

**PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA BANJARMASIN**  
**(Studi Kesesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah**  
**dengan Hasil Musrenbang Tahun Anggaran 2016**  
**di Kecamatan Banjarmasin Tengah)**

**Anwar Rosshad**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
E-mail: rosshad\_66@yahoo.com

**Cynthia Winna Widya Putri**

Kementerian Dalam Negeri  
E-mail: cin\_tya04@ymail.com

**ABSTRACT**

*Participatory Development Planning in Banjarmasin (Case Study Correspondence between Banjarmasin Workplan with Results of Development Planning Consensus in 2016 at the Central Banjarmasin District. Government Work Plan (RKPD) is a document of the annual development planning designed to ensure relevance and consistency between planning, budgeting, implementation and monitoring as well as an integral part in the stage of preparation on Local Budget and Revenue Draft. This research aims to know how the follow-up on public participation in the form of the proposals in development planning consensus' results document, causes of the discrepancy, as well as the government's efforts for the creation of correspondence between Banjarmasin Workplan with Central Banjarmasin District's development planning consensus result. This research use qualitative descriptive method, as well as techniques of data collection is done through documentation and structured interview that based on Theory of Public Participation according to Cohen and Uphoff in Siti Irene (2011: 61) through a discussion of the two sub concepts of community participation: involvement in planning and involvement in the implementation outlined by several indicators. Based on the research, the authors conclude that the follow-up of public participation in the form of proposals in the outcome development planning consensus result document between Central Banjarmasin District to Banjarmasin Workplan as much as 43,173%.*

**Keywords:** *participatory development, government workplan.*

**ABSTRAK**

**Pembangunan Partisipatif di Kota Banjarmasin (Studi Kesesuaian antara RKPD Kota Banjarmasin dengan Hasil Musrenbang Tahun Anggaran 2016 di Kecamatan Banjarmasin Tengah).** Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut terhadap partisipasi masyarakat berupa usulan dalam dokumen hasil musrenbang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara terstruktur terbuka didasarkan oleh konsep Teori Partisipasi Masyarakat menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene (2011:61) melalui pembahasan dua subkonsep partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan dalam perencanaan dan keterlibatan dalam pelaksanaan yang dijabarkan melalui beberapa indikator. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut partisipasi masyarakat berupa usulan dalam dokumen hasil musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah terhadap RKPD yang masuk dalam RKPD Kota Banjarmasin sebesar 43.173%.

**Kata kunci:** pembangunan partisipatif, RKPD.

## PENDAHULUAN

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2015 tentang RKPD

Kota Banjarmasin Tahun 2016 memuat tentang penjabaran hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Hal itu mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Penyusunan Rancangan RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016 ini telah melalui proses yang melibatkan berbagai perwakilan *stakeholders* yaitu, antara lain dari unsur Perguruan Tinggi, LSM, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi, Delegasi Kecamatan dan DPRD. Keterlibatan tersebut, dimulai sejak dilaksanakannya Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota Banjarmasin.

RKPD Kota Banjarmasin ini memuat RKPD untuk seluruh SKPD dan kecamatan yang ada di Banjarmasin. Untuk Kecamatan Banjarmasin Tengah

sendiri, pada tahun 2014 dan 2015 terdapat beberapa usulan yang menjadi prioritas masyarakat dalam musrenbang kecamatan, namun tidak dimasukkan ke dalam RKPD kota Banjarmasin. Pada hasil musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah tahun 2014 di bidang Pendidikan yaitu pengajuan beasiswa terhadap 74 anak kurang mampu, bidang Kesehatan yaitu pengajuan dana untuk perbaikan sarana prasarana di 6 Posyandu dan di bidang lingkungan yaitu pengadaan gerobak sampah sebanyak 69 buah serta tong sampah sebanyak 104 buah.

Hasil musrenbang tahun 2015 di bidang pendidikan, pengajuan beasiswa bagi 72 anak yang tidak mampu di kecamatan Banjarmasin Tengah, di bidang keagamaan dan sosial yaitu sosialisasi pencegahan paham-paham radikal di 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, serta pada bidang lingkungan yaitu pengajuan pengadaan gerobak sampah sebanyak 24 buah untuk 12 kelurahan yang ada dan bak sampah sebanyak 60 buah untuk 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Hal tersebut di atas tidak masuk dalam RKPD Kota Banjarmasin tahun 2014 dan 2015 yang terdapat di

Kantor Bappeda Kota Banjarmasin. Padahal usulan tersebut merupakan skala prioritas dalam musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah. Dengan demikian, terlihat penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2016 yang memuat rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2016. Diketahui bahwa jumlah pagu indikatif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bagi masing-masing SKPD mengalami keterbatasan anggaran untuk dapat memenuhi program dan kegiatan yang diusulkan oleh kecamatan, termasuk kecamatan Banjarmasin Tengah. Dengan kata lain, tidak semua usulan program hasil musrenbang kecamatan dapat

direalisasikan dalam penyusunan RKPD. Pagu indikatif kecamatan itu sendiri merupakan sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja (APBD) untuk merencanakan program/kegiatan di tingkat kecamatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD sektoral. Mekanisme penyusunan program/kegiatan untuk pagu indikatif kecamatan ini dilakukan secara partisipatif melalui musrenbang kecamatan dengan berdasarkan kepada prioritas program yang diusulkan tiap desa/kelurahan di kecamatan tersebut.

Berikut perbandingan pagu hasil musrenbang kecamatan Banjarmasin Tengah dengan pagu indikatif sektoral dalam RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016 yang dimiliki oleh SKPD sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut.

**Tabel 1** Perbandingan Pagu Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Pagu Indikatif SKPD

No	Kegiatan Prioritas	Pagu Musrenbang Kecamatan (Rp)	SKPD yang Melaksanakan	Pagu Indikatif Sektoral (Rp)
1	Peningkatan Jalan	23.089.150.000	Dinas Bina Marga	20.000.000.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	750.000.000	Dinas Pendidikan	864.000.000
3	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	233.100.000	Kesbangpol	60.000.000
4	Identifikasi Saluran Drainase	2.285.000.000	Dinas SDA dan Drainase	120.000.000
5	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	218.792.500	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1.272.000.000
6	Program pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan KompetitifUKM	132.000.000	Dinas Koperasi dan UMKM	600.000.000

**Sumber:** Laporan Hasil Musrenbang 2015 dan RKPD 2016 (diolah oleh penulis)

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang RKPD Kota Banjarmasin yang di dalamnya terdapat rencana-rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin terhadap hasil dari musrenbang di Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tahun 2016. Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana tindak lanjut partisipasi masyarakat berupa usulan dalam dokumen hasil musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah terhadap RKPD Kota Banjarmasin?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan memaparkan isi dari objek yang diteliti. Sukardi (2009: 157) mengungkapkan bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.

Pada metode deskriptif, objek penelitian digambarkan secara sistematis sesuai fakta yang ada tanpa adanya control dan manipulasi. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara terstruktur terbuka didasarkan oleh konsep Teori Partisipasi Masyarakat menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene (2011:61).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembahasan dua subkonsep partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan yang dijabarkan melalui beberapa indikator. Berdasarkan

data yang diperoleh pada penelitian, data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Tahap pengumpulan data, yaitu proses dalam penelitian yang mengumpulkan data dengan menggunakan instrument penelitian. Tahap reduksi, yaitu pengelompokan data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan. Tahap penyajian data, yaitu penyajian berbagai informasi yang diperoleh untuk memberikan kemungkinan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Tahap penarikan simpulan atau verifikasi, yaitu penarikan simpulan dari data yang telah dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil yang peneliti dapatkan selama melaksanakan penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah dengan mengelompokkannya pada tiap-tiap dimensi Teori Partisipasi Masyarakat menurut *Cohen dan Uphoff* dalam Siti Irene (2011:61):

### **Tindak Lanjut terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banjarmasin Tengah**

Gambar tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat melalui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, adanya sumbangan dan dukungan dari masyarakat baik itu berupa moral maupun material dan tumbuhnya tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Banjarmasin Tengah pada hari Rabu, 1 Februari 2017, beliau menjelaskan bahwa:

Pihak pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah akan berupaya semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti usulan yang disampaikan oleh masyarakat di tingkat kota. Akan dikelompokkan sesuai dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan SKPD terkait. Tentunya dalam mengupayakan tindak lanjut ini harus ada skala prioritas yang jelas tentang hal apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tidak mungkin semua usulan bisa direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Sehingga saya sebagai pihak kecamatan sendiri harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi kebutuhan yang mendesak di Kecamatan Banjarmasin Tengah itu sendiri.

Peneliti pun menanyakan lebih lanjut bagaimana nantinya proses tindak lanjut dari aspirasi tersebut. Camat Banjarmasin Tengah pun memberikan penjelasannya:

Nantinya setelah aspirasi yang ada itu ditampung dan dipilah-pilih, selanjutnya aspirasi tersebut akan kami bawa ke tingkat musrenbang Kota yang mana pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah akan melakukan asistensi. Di mana asistensi ini dalam musrenbang tingkat Kota bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut per meja-meja yang sudah disusun sesuai dengan

SKPD yang ada. Usulan masyarakat tersebut nantinya akan kami antarkan per meja SKPD yang menaungi dari program dan kegiatan dari usulan masyarakat tersebut.

Hasil wawancara di atas dapat memberikan pemahaman bahwa pihak Kecamatan Banjarmasin Tengah akan semaksimal mungkin memperjuangkan usulan dari masyarakat apalagi usulan yang bersifat sangat prioritas. Dengan demikian masyarakat tidak merasa kapok atau jera karena usulan mereka tidak ditindaklanjuti. Jika hal ini terjadi maka akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berujung pada tidak tingginya animo masyarakat untuk mengikuti musrenbang nantinya.

### **Program dan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Banjarmasin Tengah**

Pada saat melakukan penelitian di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa dokumen penting terkait dengan hasil musrenbang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan RKPD Kota Banjarmasin. Peneliti pun mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang menyangkut usulan masyarakat mulai dari musrenbang kelurahan yang akan diteruskan ke musrenbang kecamatan dan berlanjut ke RKPD Kota Banjarmasin. Adapun peneliti mengolah hasil musrenbang yang dilakukan di Kelurahan Antasan Besar, selanjutnya peneliti mengolah data tersebut dengan mencocokkan Hasil Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah. Hal itu dapat digambarkan dalam Tabel 1.

**Tabel 1** Perbandingan Usulan Hasil Musrenbang Kelurahan Antasan Besar yang Masuk dalam Hasil Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun Anggaran 2016

No	Usulan Program	No	Program dalam RKPD	Keterangan
1	Pemasangan atap dan Plafon Kantor Kelurahan	1	Pemasangan atap dan Plafon Kantor Kelurahan	-
2	Peninggian halaman kantor dan tempat parkir kantor	2	Peninggian halaman kantor dan tempat parkir kantor	-
3	Pengaspalan jalan Simp Bali Gg.Telerama	3	Pengaspalan jalan Simp Bali Gg.Telerama II	Usulan pada tahun sebelumnya
4	Peninggian Jalan Cor Beton Jl. Simp Bali	4	Peningkatan jalan Gg. Sangasanga Rt.20	-
5	Peninggian Jalan Gang Angsoka I RT.17	5	Peningkatan jalan Gg. H.Sani Rt.20	-
6	Pengurukan Titian dengan Cor Semen Gang Angsoka III Rt. 17	6	Pengurukan Titian dengan Cor Semen Gang Angsoka II	Usulan Pada Tahun Sebelumnya
7	Peninggian Jalan Gang Hikmah RT.20	7	Pembuatan Siring Beton Jalan Batu Piring Rt.12	-
8	Peningkatan jalan Gg. Sangasanga Rt.20	8	Peningkatan Jalan Jl. Simpang Bali Rt.14	Usulan pada Tahun Sebelumnya
9	Peningkatan jalan Gg. H.Sani Rt.20	9	Pembuatan Siring Beton Jalan Batu Piring	-
10	Pembuatan Siring Beton Jalan Batu Piring	10	Pembuatan pagar langgar Jl. Sutoyo S Rt.18	-
11	Pembuatan Siring Beton Jalan Batu Piring Rt.12			-
12	Peningkatan Langgar Nurul Iman			-
13	Pembuatan pagar langgar Jl. Sutoyo S Rt.18			-
14	Penggantian atap seng dengan multi Roop Langgar Al-Musawiyag			-
15	Pengadaan Gerobak Sampah 22 RT			-
16	Pengadaan Bak Sampah 22 RT			-
17	Pembuatan Pos Kamling			-
18	Bedah Rumah (2 unit)			-
19	Pengerukan Saluran Air RT.13			-
Total = 19 Usulan		Total = 10 Usulan yang diterima Presentase = 52.6%		

**Sumber:** Hasil Musrenbang Kelurahan Antasan Besar dan RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016, diolah oleh Peneliti tahun 2017

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua usulan yang diajukan oleh Kelurahan Antasan Besar dicantumkan dalam hasil RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016. Usulan yang diajukan oleh Kelurahan Antasan Besar berjumlah 19 usulan. Usulan yang masuk dalam RKPD Kota Banjarmasin hanya 10 usulan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 52.6% usulan yang termuat ke dalam RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016.

Adapun usulan yang termuat di dalam RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016 ini juga ada yang bukan merupakan usulan pada tahun anggaran 2016. Terdapat 3 usulan yang tidak diusulkan namun masuk ke dalam Hasil Musrenbang Kelurahan Antasan Besar. Tiga usulan tersebut

bisa masuk ke dalam hasil musrenbang tahun anggaran 2016 dikarenakan tiga usulan tersebut merupakan usulan yang diusulkan oleh masyarakat yang ada pada tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 2015 yang belum bisa terealisasi di tahun 2015, sehingga usulan tersebut dimasukkan kembali ke dalam usulan pada tahun anggaran 2016 agar sekiranya dapat ditindaklanjuti mengingat usulan tersebut merupakan usulan prioritas bagi masyarakat kelurahan Antasan Besar.

Selain mencocokkan hasil musrenbang Kelurahan Antasan Besar, peneliti juga mencocokkan hasil musrenbang Kelurahan Gadang dengan Hasil Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah. Adapun data tersebut peneliti olah sebagai tergambar dalam Tabel 2 berikut.

**Tabel 2** Perbandingan Usulan Hasil Musrenbang Kelurahan Gadang yang Masuk dalam Hasil Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun Anggaran 2016

No	Usulan Program	No	Program dalam RKPD	Keterangan
1	Pengecoran Jalan Gg Jambu Rt.1, 50meter	1	Peningkatan Jalan aspal/ Cor Beton Jl. AES Nasution Gg.Binjai RT.2	Usulan tahun sebelumnya
2	Perbaikan Jalan Cor Beton Rt 3, 2 x 60m	2	Perbaikan Jalan Cor Beton RT.3, 2 x 35m	-
3	Perbaikan Jalan Cor Beton Rt 3, 2 x 35m	3	Pengecoran Jalan Gg.Mufakat RT.5, 2 x 50m	-
4	Perbaikan Jalan rusak Rt.4, 100m x 170cm	4	Perbaikan jalan Gg.Syuhada RT.12, 3 x 75 m	-
5	Pengecoran Jalan Gg.Mufakat Rt.5, 2 x 50m	5	Perbaikan Jl KP.Tendean Gg.P&K Rt.16	-
6	Pengecoran Jalan Gg.Mufakat Rt.5, 1 x 30m	6	Perbaikan Jalan Gg.Mido Rt. 13, 50 meter	-
7	Perbaikan jalan Gg.Syuhada Rt.12, 3 x 75 m	7	Perbaikan Saluran drainase Gg Jambu Rt.1, 50 meter	-
8	Perbaikan Jalan Gg. Musyawarah Rt.7, 4 x 100m	8	Peningkatan jalan aspal Jl. AES Nasution Gg. Binjai Rt.3	Usulan tahun sebelumnya
9	Perbaikan Jalan Gg. Fila Rt 7, 2 x 120m	9	Pembuatan Siring Sungai Benawa Rt.3	-

10	Perbaikan Jalan Gg.Mido Rt. 13, 50 meter	10	Pembuatan lampu penerangan jalan, 4 titik lokasi	-
11	Perbaikan Jl KP.Tendean Gg.P&K Rt.16			-
12	Perbaikan Jalan Ulin Gg. Musyawarah Rt.5, 1 x 25meter			-
13	Perbaikan Saluran drainase Gg Jambu Rt.1, 50 meter			-
14	Pembuatan Siring Sungai Benawa Rt.3			-
15	Pembuatan Gorong-Gorong Rt.3, 4 titik			-
16	Pembuatan siring atau got Rt.3, 1 x 100meter			-
17	Pembuatan Drainase Gg.Syuhada Rt.11, 1 x 60 meter			-
18	Pembuatan Drainase Jl. AIS Nasution Rt.13, 100 meter			-
19	Pembuatan Jembatan Gg. Budi Warga Rt.14, 3 x 4 meter			-
20	Grobak Sampah Gg.Karang Dukuh Rt.15, 2 buah			-
21	Perbaikan Pos Kamling Gg.Syuhada Rt.12, 3 x 4 meter			-
22	Pembuatan lampu penerangan jalan, 4 titik lokasi			-
23	6 buah rumah untuk di bedah Rt.4			-
Total = 23 usulan		Total = 10 usulan yang diterima		Presentase = 43.47%

**Sumber:** Hasil Musrenbang Kelurahan Gadang dan RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016, diolah oleh Peneliti.

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh informasi bahwa total usulan yang diusulkan oleh Kelurahan Gadang sebanyak 23 usulan dengan berbagai macam usulan yang berkaitan dengan dinas terkait. Selanjutnya dari 23 usulan yang terdapat dalam hasil musrenbang tersebut masuk ke dalam hasil RKPD Kota Banjarmasin sebanyak 10 usulan. Memang tidak semua usulan yang diusulkan oleh Kelurahan Gadang masuk seluruhnya dikarenakan

adanya keterbatasan anggaran dan usulan tahun lalu yang sudah menjadi usulan yang sangat prioritas yang harus diajukan.

Dari 10 usulan yang diterima, ada 2 usulan yang merupakan usulan tahun sebelumnya yang hendaknya ditindak lanjuti pada tahun anggaran 2016 ini. Dengan presentase sebanyak 43.47% inilah usulan yang diterima pada musrenbang Kota sehingga kemudian dimuat dalam RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016.

Peneliti juga melakukan perbandingan antara hasil musrenbang Kelurahan Pekapuran Laut yang masuk ke dalam Hasil Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah. Adapun hasil tersebut peneliti olah sebagai berikut:

**Tabel 3** Perbandingan Usulan Hasil Musrenbang Kelurahan Pekapuran Laut yang Masuk ke Hasil Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun Anggaran 2016

No	Usulan Program	No	Program dalam RKPD	Keterangan
1	Pembuatan Jalan Tembus Rt.02, 80m x 2,5m	1	Perbaiki Drainase Jl.Manggis Rt.5	Usulan tahun sebelumnya
2	Semenisasi Gang Keluarga Rt.06	2	Mengatasi Banjir dengan pembersihan Drainase di Gang Keluarga RT.06	-
3	Mengatasi Banjir dengan pembersihan Drainase di Gang Keluarga RT.06	3	Peninggian jalan Rt.10 Gg. Suka Damai	-
4	Peninggian Jalan Gang Suka Damai Rt.09	4	Peningkatan jalan Gang Rahmad Rt.16	-
5	Peninggian jalan Rt.10 Gg. Suka Damai	5	Peningkatan jalan Gang Buntu Rt.16,	-
6	Peningkatan jalan Gang Rahmad Rt.16	6	Pembuatan Gorong-gorong	-
7	Peningkatan jalan Gang Buntu Rt.16, 27x1.5m	7	Peningkatan jalan Gg.Hasanuddin Rt.17	-
8	Peningkatan jalan Rt.16 Gg.Buntu 26x2.3m			-
9	Rehab rumah tidak layak Jl.Pekapuran Laut Gg.Buntu			-
10	Pembuatan Gorong-gorong			-
11	Saluran gorong-gorong Top Bottom Gg. Nangka Rt.15			-
12	Gerobak sampah			-
13	Tempat sampah			-
14	Penyediaan Pot bunga			-
15	Peningkatan jalan Gg.Hasanuddin Rt.17			-
16	Pembuatan Cor beton Gg.Hasanuddin Rt.17			-
Total = 16 usulan		Total= 7 usulan yang diterima		Presentase: 43.75%

**Sumber:** Hasil Musrenbang Kelurahan Pekapuran Laut dan Hasil RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016, diolah oleh Peneliti.

Data di atas memberikan informasi bahwa total usulan yang diajukan pihak Kelurahan Pekapuran Laut sebanyak 16 usulan. Selanjutnya usulan yang masuk ke dalam Hasil Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah sejumlah 7 usulan dan ada 1 usulan yang merupakan usulan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan anggaran yang ada yang tidak memungkinkan pihak Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk memasukkan seluruh usulan yang diajukan agar bisa ditindaklanjuti. Keterbatasan

pagu indikatif inilah yang akhirnya hanya menghasilkan 43.75% usulan yang yang diterima pada musrenbang Kota sehingga kemudian dimuat dalam RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016.

Selain mengolah data dari hasil musrenbang Kelurahan, peneliti juga mengolah data dari Hasil Musrenbang Kecamatan yang masuk dalam RKPD Kota Banjarmasin. Adapun hasil usulan yang masuk dalam RKPD Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut.

**Tabel 4** Perbandingan Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah yang Masuk dalam RKPD Kota Banjarmasin

No	OPD yang Melaksanakan	Target	Realisasi
1	SDA dan Drainase	Perbaikan Drainase di JL.Melayu Darat s/d Pahlawan Rt.10,8,7,6 Perbaikan Drainase di Rt.15 (Kel Seberang Masjid) Pembuatan Drainase JL.Cempaka XI RT.005 RW.001 Pembuatan Drainase Haryono MT RT.005 dan RT.007 Pembuatan Drainase Jl. Niaga Timur&Utara s/d Jl.Kamtao RT.12 Perbaikan Drainase Jl. P Antasari RT 01 s/d RT.20 Perbaikan Drainase Jl. Pengadaian RT.01 dan RT.02 Perbaikan Drainase Kolonel Sugiono RT. 03, 04, 05,06 Perbaikan Drainase Jl. Simpang Sungai Bilu menuju PDAM RT.6 Perbaikan Drainase Jl. Simpang Sungai Bilu RT.21 dan RT.06	masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk
2	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Pengadaan 24 Gerobak Sampah Pengadaan 60 Bak Sampah	masuk Hanya 40 bak sampah
3.	Kesbangpol	Pengadaan Pos Kamling Kelurahan Teluk Dalam RT.14 (1 buah) Perbaikan Pos Kamling Gg.Syuhada RT.12 (1 buah) Pengadaan Pos Kamling Kelurahan KBU RT.02&RT.09 (2 buah)	masuk masuk

		Perbaikan Pos Kamling Jl.Kampung Arab Gg. Ibu RT.13 (1 buah)	
4.	Dinas Pendidikan	Pemberian Beasiswa kepada 72 siswa yang kurang mampu	masuk
5	Dinas Koperasi dan UMKM	Pinjaman Lunak Usaha Kecil	masuk
6	Dinas Binamarga	Perbaikan Jalan RT.01 RW.02 (Kel.Seberang Masjid)	
		Perbaikan Jalan Gg.M Hamsir RT.04 Kel Seberang Masjid	
		Peningkatan Jalan Gg Karana Rakat RT.17 Kel.Seberang Masjid	
		Perbaikan/Peningkatan Jl. A. Yani Km1 Gg Terminal RT.18	
		Jembatan 3 Ramadhan Pek. A RT.10	
		Pengaspalan Jalan Jl. H. Anang Adenansi Ex Lap. Kamboja	
		Pengaspalan Jalan Jl. H. Anang Adenansi RT.3	
		Pengaspalan Jalan Jl. Lambung Mangkurat RT.5	
		Perbaikan/Peningkatan Jl. H. Djok Mentaya RT.01	
		Perbaikan/Peningkatan Jl. Gg Samping Mama Ading RT.01	
		Perbaikan/Peningkatan Jl. Haryono MT Gg Bina Warga RT.06	
		Peningkatan Jalan Aspal Jl.Kolonel Sugiono RT.01 dan RT.05	masuk
		Peningkatan Jalan Aspal Jl. Pegadaian RT.01 dan RT.02	
		Peningkatan Jalan Aspal Jl. Pekapuran B Laut RT.06 s/d RT.20	
		Peningkatan Jl.Pekapuran B Laut Gg.Abulung RT.20	masuk
		Jembatan Gg Famili RT.11	
		Jembatan Ujung Kerokan RT.29	
		Jembatan Samping Langgar Komp. DPR Gg. V RT.64	
		Perbaikan/Peningkatan Jl. Utama Es Terang RT.20	
		Perbaikan/Peningkatan Jl. Utama Rawasari Raya RT.55	
		Peningkatan Jalan Komp.Pondok Indah RT.23	
		Perbaikan/Peningkatan Jl. Batu Benawa 6 RT.45	
		Perbaikan/Peningkatan Jalan Batu Benawa 6 Gg.3 dan 5 RT.47	masuk
		Perbaikan/Peningkatan Jl. Sutoyo S Gg Remaja RT.2	
		Perbaikan/Peningkatan Jl. Gg Al-Khair RT. 6	
		Perbaikan/Peningkatan Gg.Warga RT.6	masuk
		Perbaikan/Peningkatan Gg. Kita RT.21	masuk
		Perbaikan/Peningkatan Jl. Komp.Saleh RT.21	masuk
		Perbaikan/Peningkatan Jl.Sutoyo s Gg.12 RT.22	masuk
		Perbaikan/Peningkatan Jl.S Parman Gg.Tera RT.22	masuk

Perbaikan/Peningkatan Jl.H.Sani RT.10	masuk
Jalan Aspal Jl.SImp Bali Gg. Telerama tembus lorong Mardiah	
Jalan Aspal Jl.SImp Bali Gg. Telerama tembus Jl.Mardiah	
Perbaikan/Peningkatan Jl.Dahlia Kebun Sayur tikungan Cempaka XIII	
Total Usulan: 52 Usulan	U s u l a n yang masuk RKPD: 22 Usulan

**Sumber:** RKPD Kota Banjarmasin dan Hasil Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2016, diolah oleh Peneliti.

Dari tabel hasil perbandingan usulan hasil musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah yang masuk dalam RKPD Kota Banjarmasin di atas dapat dilihat bahwa tidak semua usulan yang diajukan oleh Kecamatan Banjarmasin Tengah masuk seluruhnya dalam RKPD Kota Banjarmasin. Dari 52 usulan yang diusulkan oleh pihak kecamatan, hanya ada 22 usulan yang masuk atau sekitar 43% saja. Hal ini pun terjadi karena berbagai macam hal seperti terbatasnya anggaran yang ada dan adanya usulan tahun lalu yang menjadi prioritas dan harus dikerjakan tahun anggaran 2016 karena sudah tertunda pengerjaannya.

Program dan Kegiatan yang ada di RKPD Tahun Anggaran 2016 yang peneliti dapatkan dokumennya pada bagian Sub-Perencanaan dan Keuangan. Pada saat itu peneliti langsung melakukan wawancara dengan Staf Sub Perencanaan dan Keuangan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Bapak Agus Hariyadi SE, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017. Beliau mengungkapkan bahwa:

RKPD Kota Banjarmasin yang ada ini sudah cukup mencakupi hasil dari musrenbang yang direncanakan oleh masyarakat berdasarkan skala prioritasnya, hanya saja tidak semua usulan masyarakat dapat masuk kedalam RKPD secara keseluruhan. Di dalam RKPD ini saja terdapat 22 usulan yang dianggarkan untuk Kecamatan Banjarmasin Tengah, tetapi dalam pelaksanaannya ada program-program yang dihapuskan serentak di 5 Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin. Program yang dihapuskan itu yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan kegiatannya yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan/titian. Yang saya tahu ada program yang dihapuskan itu karena atas hasil kesepakatan 5 camat waktu rapat di DPRD. Adapula pada kegiatan Peningkatan Sinergitas Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang masuk dalam Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut digabung ke Program Pemeliharaan

Kanrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal dan Kegiatan Penunjang FKDM Kecamatan.

Hasil wawancara di atas senada dengan pendapat Bapak M. Lukmannul Hakim, S.Ap selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Bappeda Kota Banjarmasin yang peneliti langsung wawancarai di hari yang sama. Beliau mengungkapkan bahwa:

Ada beberapa program dan kegiatan yang diajukan oleh Kecamatan Banjarmasin Tengah yang dimuat dalam RKPD Kota Banjarmasin berjumlah 22 usulan. Usulan tersebut pun merupakan usulan-usulan yang prioritas yang sudah dinilai berdasarkan keadaannya sebenarnya melalui survey oleh tim aju/tim monitor yang memantau mana yang dirasa usulan yang benar-benar prioritas bagi masyarakat. Sehingga bisa lebih menentukan usulan yang prioritas di antara banyaknya usulan yang masuk tersebut.

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara di atas, peneliti dapat memberikan simpulan bahwa belum adanya kesesuaian antara hasil musrenbang dengan RKPD Kota Banjarmasin. Hal ini dapat terlihat dari hasil RKPD Kota Banjarmasin untuk Kecamatan Banjarmasin Tengah ini yang hanya ada 22 usulan yang diajukan yang masuk ke dalam RKPD Kota Banjarmasin. Usulan tersebut merupakan usulan prioritas yang diusulkan oleh masyarakat yang selanjutnya disurvey oleh tim monitor dari pemerintah tentang keadaan yang sebenarnya dari usulan tersebut. Hasil survey/monitor itulah yang digunakan pemerintah untuk melakukan *cross check* kebenaran tentang keadaan nyata dari usulan tersebut. Sebagai contoh,

jika masyarakat mengusulkan usulan yang sangat mendesak yaitu perbaikan jalan, tentunya tim monitoring harus terlebih dahulu meninjau lokasi tersebut apakah benar-benar patut untuk diperbaiki berdasarkan usulan masyarakat yang diterima pemerintah.

### **Proses Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah**

Pada Musrenbang Kecamatan akan ditentukan prioritas usulan/program kegiatan dari masing-masing Kelurahan serta pengklasifikasiannya baik dari sifat kegiatannya (fisik dan nonfisik) dan sumber-sumber pembiayaannya (APBD maupun APBN) serta kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai. M e k a n i s m e ataupun tahap pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah sebagai berikut:

#### **A. Tahap Persiapan**

1. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
2. Rekrutmen Tim Pemandu Musrenbang oleh Bappeda
3. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Memilah dan mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing Kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
  - Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan kemudian mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang Kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan agar

peserta bias menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.

- Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari Kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
- Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang Kecamatan.
- Informasi Pagu indikatif
- Membuat Draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan

#### **B. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan**

Tahap pelaksanaan Musrenbang dengan agenda sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
2. Pembukaan acara
3. Pemaparan Camat mengenai prioritas masalah Kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
4. Pemaparan mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat Kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran plafon dana oleh Kepala-Kepala Cabang SKPD dari kota.
5. Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing Kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
6. Verifikasi oleh delegasi Kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
7. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
8. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh Kelurahan (kegiatan lintas Kelurahan yang belum diusulkan Kelurahan).
9. Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
10. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
11. Pemaparan prioritas pembangunan Kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
12. Penetapan daftar nama delegasi Kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kota. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.
13. Notulensi Musrenbang kecamatan sebagai bahan untuk memperbaiki draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan.

Partisipan dalam Musrenbang Kecamatan:

1. Delegasi kelurahan/ desa
2. Anggota DPRD yang berasal dari Dapil yang bersangkutan
3. LSM yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan bersangkutan

4. Kelompok-kelompok sektoral tingkatan kecamatan seperti: Petani, Ojeg, Nelayan, Buruh,serta kelompok lainnya
5. Kelompok perempuan, dan
6. Perwakilan pengusaha lokal yang didasari pada kemampuannya untuk meningkatkan sumberdaya lokal

Narasumber dalam Musrenbang Kecamatan:

1. Bappeda
2. Perwakilan SKPD
3. Kepala-Kepala Cabang SKPD di Kecamatan yang bersangkutan
4. Kepala-Kepala Unit Pelayanan di Kecamatan.
5. Anggota DPRD dari Wilayah Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan.
6. Camat dan aparat Kecamatan,
7. LSM yang bekerja di Kecamatan yang bersangkutan, dan
8. Para ahli/professional yang dibutuhkan.

### **C. Pasca Musrenbang Kecamatan**

Tim Pelaksana Musrenbang menyiapkan:

- Dokumentasi hasil Musrenbang kecamatan.
- Penyusunan Berita Acara Musrenbang kecamatan.
- Penyampaian hasil Musrenbang kecamatan kepada Kepala Bappeda.
- Pengumuman hasil Musrenbang kecamatan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang kecamatan.
- Pembekalan delegasi Musrenbang kecamatan

- SK Camat untuk Tim Delegasi kecamatan.

Musrenbang Kecamatan adalah kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan Musrenbang Kecamatan dapat menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Kecamatan dalam penentuan kegiatan yang akan dilakukan di kecamatan tersebut. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini, agar nantinya apa saja yang menjadi usulan masyarakat ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga masyarakat merasakan bahwa partisipasi dari mereka itu sangatlah penting guna membangun Kecamatan Banjarmasin Tengah ke arah yang lebih baik lagi.

### **Keterlibatan dalam Perencanaan**

Usulan-usulan yang dikemukakan oleh masyarakat sangat bervariasi mulai dari usulan yang merupakan kebutuhan itu sendiri sampai dengan usulan yang bersifat keinginan masyarakat. Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk benar-benar bisa memilah dan memilih mana yang merupakan usulan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan mana usulan yang merupakan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat dalam menyampaikan informasi dan data dari usulannya pun sudah sangat dipersiapkan sebelum adanya rapat musrenbang ini, sehingga pada saat rapat musrenbang ini usulan yang diajukan ini benar-benar usulan yang lengkap.

Contohnya ada salah satu masyarakat yang mengusulkan perbaikan jalan atau pengaspalan kembali di Jalan Cempaka Besar & Kaca Piring RT.02 dengan volume 350m x 50cm. Dari usulan tersebut terlihat bahwa masyarakat yang

mengusulkan usulannya tersebut sudah melakukan persiapan yaitu dengan mengetahui berapa meter jalan yang akan diperbaiki tersebut.

Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam penetapan laporan hasil musrenbang. Pada penetapan laporan hasil mesrenbang masyarakat juga dilibatkan dengan hasil musrenbang tahun anggaran 2016 yaitu ada 52 usulan yang ditetapkan masuk dalam laporan hasil musrenbang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Lima puluh dua usulan ini bervariasi yaitu ada usulan yang diusulkan berhubungan dengan Dinas Pendidikan yaitu pemberian 72 beasiswa bagi anak-anak yang tinggal di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang kurang mampu. Selain itu ada 4 usulan yang berhubungan dengan Kesbangpol, 60 bantuan pinjaman usaha kecil pada dinas Koperasi dan UMKM, 10 usulan untuk ditindaklanjuti di Dinas Sumber Daya Air dan Drainase dan 24 usulan yang berhubungan dengan Dinas Binamarga.

### **Keterlibatan dalam Pelaksanaan**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah keterlibatan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah secara sukarela dan aktif untuk memberikan dana, tenaga, material, dan sebagainya, dalam rangka mencapai keberhasilan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif yang akan dilaksanakan. Dimensi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana partisipasi masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dapat dilihat melalui 1). Keikutsertaan

dalam perencanaan program pembangunan; 2). Adanya sumbangan dan dukungan dari masyarakat; 3). Terakomodirnya pendapat masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat kita lihat dari keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan yang ada. Dalam hal ini masyarakat sudah turut serta berperan aktif dalam pelaksanaan rapat musrenbang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Hal ini dapat terlihat dari hasil musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah yang menghasilkan usulan prioritas sebanyak 52 usulan. Hal ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi yang nyata dari masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah itu sendiri. Tingkat antusiasme masyarakat Banjarmasin Tengah dalam mengikuti musrenbang ini juga disampaikan dalam hasil wawancara peneliti kepada Camat Banjarmasin Tengah pada 1 Februari 2017, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Masyarakat Banjarmasin Tengah ini sangat bagus antusiasnya dalam pelaksanaan rapat musrenbang di Kecamatan, untuk itu perlu kita jaga antusiasme nya itu agar masyarakat tidak kecewa dalam menyampaikan aspirasinya. Cara kita menjaga kepercayaan masyarakat itu dengan jalan memperjuangkan usulannya tersebut ke tingkat kota agar dapat ditindaklanjuti, sehingga masyarakat tidak kapok untuk datang ke rapat musrenbang tahun-tahun berikutnya. Walaupun tidak semua usulan dapat tercover seluruhnya, tapi secara tidak langsung kita sebagai aparat kecamatan tidak boleh mematahkan semangat dan antusiasme warga untuk menyampaikan usulannya. Kita harus tetap menjaga niat baik dari masyarakat untuk tetap menyampaikan usulannya

demi pembangunan yang baik di daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pendapat masyarakat ini akan ditindaklanjuti yaitu akan diperjuangkan di tingkat kota agar usulan yang menjadi prioritas masyarakat bisa diproses dengan segera sehingga pendapat masyarakat tersebut bisa terakomodir. Walaupun usulan tersebut tidak bisa semuanya diproses secara langsung karena adanya keterbatasan anggaran yang ada, tapi setidaknya usulan tersebut bisa menjadi usulan yang sangat prioritas di tahun anggaran berikutnya. Sehingga masyarakat tetap merasa dilibatkan dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya mengenai Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa:

Tindak lanjut partisipasi masyarakat berupa usulan dalam dokumen hasil musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah terhadap RKPD yang masuk dalam RKPD Kota Banjarmasin sebesar 43.173%.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Alwasilah, A. Chaedar. 2009. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
- Arif, Syaiful. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Kebijakan*. Malang: Averroes Press
- Arsyad, Lincolin. 2002. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Berg, B.L. 2001. *Qualitative Research Methods for The Social Science*. Boston: Allyn & Bacon Press
- Cohen and Uphoff. 1997. *Rural Development Participation*. New York: Cornell University
- Conyers, Diana. 1991. "An Introduction to Social Planning in The Third World" By Jhon Wiley&Sons Ltd. 1994. *Terjemahan Drs. Susetiawan. Su: "Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar"*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas
- \_\_\_\_\_. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan & Pemerataan)*. Jakarta: CIDES
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Erlangga

- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Maxwell, Joseph A. 1996. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. Thousand Oaks: Sage Publications
- Neuman. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. US: Pearson
- Nugroho, Riant. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
- Osborne, David Gebler. 1995. *Mewirauahakan Birokrasi, Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*. Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo
- Sastropoetro, Santoso R.A. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: MandarMaju
- Soehoed. 2006. *Strategi Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan
- Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan & Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suryono, Agus. 2001. *Teori & Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press
- Tarigan, Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bina Aksara
- Theresia, Aprillia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Wie, Thee Kian. 1981. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*. Jakarta: LP3ES
- Yahya, Afif Syafrudin dan Andi Masrich. 2015. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Buku Literatur IPDN

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

### Website dan Lain-Lain

- Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun Anggaran 2016
- Dokumen RKPD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016
- Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun Anggaran 2016
- <http://bappeda.banjarmasinkota.go.id/2015/06/rencana-kerja-pembangunan-daerah-2016.html> (Diakses 2 Oktober 2016)